

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU (013.05.2100.408894) WILAYAH PEMASYARAKATAN  
UNTUK PERIODE TRIWULAN III 2023



JLN: Sultan Babullah  
Nomor 17-18 Ambon

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 22 Januari 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Sub Bagian Pengelolaan  
Keuangan dan Barang Milik  
Negara



Maiche W Huwae  
NIP. 198105032006041002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	17
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran dan Daftar	46

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MALUKU**  
**JL. Sultan babullan No. 17-18, Ambon**  
**TELEPON 0911-352803**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku (Ditjen Pemasyarakatan 408894) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 22 Januari 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Sub Bagian Pengelolaan  
Keuangan dan Barang Milik  
Negara



Maichel W Huwae  
NIP. 198105032006041002

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 163.289.216 atau mencapai 204 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 79.886.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp 88.139.599.681 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.90.292.475.000

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 253.996.758.068, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 8.009.690.022, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 243.994.268.366 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 1.992.799.680,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.643.413.461 dan Rp 252.353.344.607

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 125.621.024. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 95.486.786.809, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 95.361.165.785 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos

Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 14.816.211 dan sebesar Rp 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 95.341.967.873.

#### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 268.603.423.683 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 95.341.967.873 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 21.840.783.840 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 100.932.595.176 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 252.353.344.607.

#### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat.	Th 2023				Th 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan negara Bukan Pajak	B.1	79.886.000	163.289.216	83.403.216		225.392.403
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>		<b>79.886.000</b>	<b>163.289.216</b>	<b>83.403.216</b>	<b>204,40</b>	<b>225.392.403</b>
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	47.616.314.000	46.283.243.138	(10.868.180.139)	97,20	44.851.370.571
Belanja Barang	B.4	38.969.414.000	38.151.979.938	(12.725.726.658)	97,90	39.607.320.939
Belanja Modal	B.5	3.706.747.000	3.704.376.605	(3.694.147.000)	99,94	1.579.897.750
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>90.292.475.000</b>	<b>88.139.599.681</b>	<b>(27.288.053.797)</b>	<b>97,62</b>	<b>86.038.589.260</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## II. NERACA

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.1.3	-	15.414.819
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	15.492.280
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Pendek	C.1.7	-	(77.461)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.10	-	-
Persediaan	C.1.10	8.009.690.022	5.177.070.910
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>8.009.690.022</b>	<b>5.192.485.729</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	102.041.077.000	123.869.827.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	56.115.708.005	47.459.305.041
Gedung dan Bangunan	C.2.3	152.343.386.499	152.261.846.499
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	176.735.352	176.735.352
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	2.991.381.641	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(69.674.020.131)	(60.280.480.759)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>243.994.268.366</b>	<b>263.487.233.133</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.1	1.961.330.680	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	1.524.593.650	2.557.709.450
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.493.124.650)	(2.520.712.450)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>1.992.799.680</b>	<b>36.997.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>253.996.758.068</b>	<b>268.716.715.862</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	1.643.413.461	113.292.179
Utang yang belum di tagihkan	C.5.3	-	-
Pendapatan diterima dimuka	C.5.4	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>1.643.413.461</b>	<b>113.292.179</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.643.413.461</b>	<b>113.292.179</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.7	252.353.344.607	268.603.423.683
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>252.353.344.607</b>	<b>268.603.423.683</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>253.996.758.068</b>	<b>268.716.715.862</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian	Cat.	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	125.621.024	164.166.366
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>125.621.024</b>	<b>164.166.366</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	46.379.762.138	44.655.955.571
Beban Persediaan	D.3	4.358.755.346	4.008.870.458
Beban Barang dan Jasa	D.4	25.622.424.213	26.332.536.838
Beban Pemeliharaan	D.5	5.687.657.721	5.336.309.729
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.145.246.563	4.824.877.508
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	9.292.940.828	8.821.264.341
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	77.461
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>95.486.786.809</b>	<b>93.979.891.906</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(95.361.165.785)</b>	<b>(93.815.725.540)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		4.381.701	35.199.009
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		7.359.701	35.199.009
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.978.000	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.816.211	(62.805.572)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.816.211	26.027.028
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	88.832.600
<b>JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11	<b>19.197.912</b>	<b>(27.606.563)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(95.341.967.873)</b>	<b>(93.843.332.103)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(95.341.967.873)</b>	<b>(93.843.332.103)</b>

(Dalam Rupiah)

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	268.603.423.683	267.444.126.448
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(95.341.967.873)	(93.843.332.103)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(21.840.706.379)	394.512.320
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(21.840.783.840)	394.512.320
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	77.461	-
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>(21.840.706.379)</b>	<b>394.512.320</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	100.932.595.176	94.607.649.018
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(16.250.079.076)	1.158.829.235
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>252.353.344.607</b>	<b>268.602.955.683</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Instansi

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Sultan Babullah No. 17-18, Kota Ambon.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkomitmen dengan misi "**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.**" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Akuntansi*

### **A.3 Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Instansi adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan- LRA</i>	<p><b>(1) Pendapatan-LRA</b> Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> <li>• Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.</li> </ul>
<i>Pendapatan LO</i>	<p><b>(2) Pendapatan-LO</b> Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan</li> <li>b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.</li> <li>c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> </ol> <p>Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.</p>
<i>Belanja</i>	<p><b>(3) Belanja</b> Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>
<i>Beban</i>	<p><b>(4) Beban</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,</li> <li>• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ul>
<i>Aset</i>	<p><b>5) Aset</b> Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p><b>a. Aset Lancar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,</li> </ul>

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
  - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

*Aset Lainnya*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas  
Pos Laporan  
Realisasi  
Anggaran

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 90.292.475.000. Selama tahun 2023, atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA

(dalam Rupiah)

Uraian	Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	79.886.000	79.886.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>79.886.000</b>	<b>79.886.000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	47.616.314.000	47.616.314.000
Belanja Barang	38.969.414.000	38.969.414.000
Belanja Modal	3.706.747.000	3.706.747.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>90.292.475.000</b>	<b>90.292.475.000</b>

Semester II Tahun Anggaran 2023

Realisasi  
Pendapatan  
Rp 163.289.216

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 163.289.216 atau mencapai 204 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 79.886.000. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Semester II Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	7.359.701	100
Pendapatan sewa tanah Gedung dan bangunan	48.133.000	90.352.590	187,71
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	31.753.000	34.414.434	108,38
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	14.816.211	100
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	15.492.280	100
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	590.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>79.886.000</b>	<b>163.289.216</b>	<b>204,40</b>

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	Perbandingan 2023 dan 2022		
	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	7.359.701	35.199.009	(79,09)
Pendapatan sewa tanah Gedung dan bangunan	90.352.590	70.158.231	28,78
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	34.414.434	31.586.240	8,95
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.816.211	3.537.028	318,88
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.492.280	22.490.000	(31,11)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	590.000	200.000	195
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	19.817.431	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>163.289.216</b>	<b>182.987.939</b>	<b>(10,76)</b>

Realisasi Belanja  
Rp  
88.139.599.681

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku pada TA 2023 adalah sebesar Rp 88.139.599.681 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp 90.292.475.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Semester II TA 2023  
(dalam Rupiah)

Uraian	Triwulan III Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	47,616,314,000	46,283,243,138	97
Belanja Barang	38,969,414,000	38,151,979,938	98
Belanja Modal	3,706,747,000	3,704,376,605	##
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>90,292,475,000</b>	<b>88,139,599,681</b>	<b>98</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(9,833)	
<b>Jumlah</b>	<b>90,292,475,000</b>	<b>88,139,589,848</b>	<b>98</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,44 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Di tahun anggaran 2023 yaitu pada belanja pegawai telah meningkat sebesar 3,19%.
2. Di tahun anggaran 2023 yaitu pada belanja barang telah menurun 3,67%.
3. Di tahun anggaran 2023 yaitu pada belanja modal telah meningkat 134,47%.

Perbandingan Realisasi Belanja  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	46,283,243,138	44,851,370,571	3.19
Belanja Barang	38,151,979,938	39,607,320,939	(3.67)
Belanja Modal	3,704,376,605	1,579,897,750	134.47
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Jumlah</b>	<b>88,139,599,681</b>	<b>86,038,589,260</b>	<b>2.44</b>

*Belanja Pegawai  
Rp 46.283.243.138*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 46.283.243.138 dan Rp 44.851.370.571. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Belanja Pegawai	46.283.243.138	44.851.370.571	3,71
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	46.283.243.138	44.851.370.571	
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>(9.833)</b>	<b>(6.532)</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>35.315.551.861</b>	<b>33.880.409.232</b>	<b>4,24</b>

Belanja Barang  
Rp  
38.151.979.938

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 38.151.979.938 dan Rp 39.607.320.939.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Triwulan III TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Belanja Barang	38.151.979.938	39.607.320.939	(3,97)
Jumlah Belanja kotor	38.151.979.938	39.607.320.939	(3,97)
Pengembalian belanja	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>38.151.979.938</b>	<b>39.607.320.939</b>	<b>3,14</b>

Belanja Modal  
Rp 3.704.376.605

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.704.376.605 dan Rp 1.579.897.750. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.278.300	1.564.319.750	(99,19)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.442.098.305	0	0

Belanja Modal  
Tanah  
Rp 0

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022 karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah  
Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-	-

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp 262.278.300

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp 262.278.300, mengalami kenaikan sebesar 20.02 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 0. Hal ini disebabkan karena ada penurunan pagu anggaran TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II TA 2023	Realisasi SM II TA 2022	%
Mobil Dinas	0	0	
A.C Split	12.600.000	0	
Meja dan Kursi			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	-
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	-

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp 3.442.098.305

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.442.098.305 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2022 dikarenakan belum direalisasikannya belanja modal gedung dan bangunan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Renovasi Gedung Kantor	3.442.098.305	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp 0*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi SM II 2023	Realisasi SM II 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Belanja Bantuan  
Sosial  
Rp0*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			

<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Aset Lancar  
Rp 8.009.690.022*

**C.1. Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 8.009.690.022 dan Rp 5.177.070.910

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara Pengeluaran  
Rp 0*

**C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Kas di bendahara pengeluaran</b>	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas di Bendahara Penerimaan  
Rp 0*

**C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.



Rincian Kas di Bendahara Penerimaan  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri No. Rek XXX	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp 0*

**C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	-	-
<b>Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan</b>	-	-
<b>Kas Lainnya dari Hibah</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang Bukan  
Pajak  
Rp 0*

**C.1.4. Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 15.492.280 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak  
Triwulan III TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Piutang PNPB</b>	-	-
<b>Piutang Lainnya</b>	-	15,492,280
<b>Jumlah</b>	-	15,492,280

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti  
Rugi (TP/TGR)  
Rp 0

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Triwulan III TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
	<b>Jumlah</b>	-	-

Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp 0

**C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
	<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jk. Pendek  
Rp 0

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 77.461, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	0	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	0	-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	0	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	-	0	-

Beban Dibayar di Muka  
Rp 0

**C.1.8. Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Pembayaran Internet</b>	-	-
<b>Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin</b>	-	-
<b>Pembayaran Sewa Gedung Kantor</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Rp0

**C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih

Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Pendapatan Jasa Pelatihan</b>	-	-
<b>Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Persediaan*  
Rp 8.009.690.022

**C.1.10. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 8.009.690.022 dan Rp 5.177.070.910 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan  
Semester II TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Barang Konsumsi</b>	6.678.075.529	3.783.538.630
<b>Amunisi</b>	911.892.988	954.408.580
<b>Bahan Untuk Pemeliharaan</b>	419.721.505	439.123.700
<b>Persediaan Lainnya</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	8.009.690.022	5.177.070.910

*Aset Tetap*  
Rp  
243.994.268.366

**C.2. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 243.994.268.366 dan Rp 263.487.233.133

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tanah*  
Rp  
102,041,077,000

**C.2.1. Tanah**

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 102.041.077.000 dan Rp 123.869.827.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	123,869,827,000
<b>Mutasi tambah:</b>	-
<b>Pembelian</b>	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
<b>Ravaluasi Aset</b>	-
<b>Penghapusan</b>	-
<b>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi</b>	(21,828,750,000)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	102,041,077,000
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023</b>	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	40.000	LP Ambon	12.353.491.000
2	110.250	LP Piru	31.711.574.000
3	2.054	Lapas Saparua	585.390.000
4	31.097	Rutan Masohi	29.112.855.000
5	29.090	Lapas Namlea	2.579.934.000
5	2.860	Lapas Banda	999.963.000
6	6.500	Lapas Geser	2.355.542.000
7	1.699	Lapas Wahai	215.003.000
8	1.725	Lapas Wonreli	113.440.000
9	5.342	Lapas Dobo	325.302.000
10	10.832	LP Tual	4.980.356.000
11	22.792	Lapas Saumlaki	5.891.162.000
12	10.000	Rutan Ambon	9.352.800.000
13	10.000	Rupbasan Ambon	1.464.265.000
<b>Jumlah</b>			<b>102.041.077.000</b>

*Peralatan dan  
Mesin*

*Rp 56,115,708,005*

**C.2.2. Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 56.115.708.005 dan Rp 47.459.305.041.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	47,459,305,041
<b>Mutasi tambah:</b>	179,622,544
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
<b>Mutasi kurang:</b>	
Penghentian aset dari penggunaan	
Penghapusan	
<b>Saldo Per 31 September 2023</b>	47,638,927,585
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 30 september 2023</b>	(37,071,082,184)
<b>Nilai Buku Per 30 september 2023</b>	10,567,845,401

Gedung dan  
Bangunan  
Rp  
152.343.386.499

#### **C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 152,343,386,499 dan Rp 152.261.846.499.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

<b>Saldo nilai perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>152.261.846.499</b>
Mutasi tambah	19.680.000
Pembangunan Gedung	
Mutasi kurang	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>152.343.386.499</b>
Akumulasi penyusutan 31 Desember 2023	(27.794.140.687)
Nilai Buku per 30 september 2023	124.487.385.812

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp 0

#### **C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

<b>Saldo nilai perolehan 31 Desember 2022</b>	-
Mutasi tambah	-
Pengembangan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang	-
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi penyusutan 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 30 september 2023</b>	-

Aset Tetap Lainnya  
Rp 176.735.352

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 september 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 176.735.352 dan Rp 176.735.352 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya  
(dalam rupiah)

<b>Saldo nilai perolehan 31 Desember 2022</b>	176.735.352
Mutasi tambah	-
-	
Mutasi Kurang	-
-	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	176.735.352
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2023	(10.900.000)
<b>Nilai buku per 31 Desember 2023</b>	<b>165.835.352</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp 2.991.381.641

### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.991.381.641 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Rp  
(69.674.020.131)

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (69.674.020.131) dan Rp (60.280.480.759)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	56.115.708.005	39.557.346.244	16.558.361.761
2.	Gedung dan Bangunan	152.343.386.499	30.105.773.887	122.237.612.612
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4.	Aset Tetap Lainnya	176.735.352	10.900.000	165.835.352
5.	Aset Tetap yang tidak di gunakan dalam operasi	1.524.593.650	1.491.849.650	32.744.000
	<b>Jumlah</b>	<b>210.160.423.506</b>	<b>69.674.020.131</b>	<b>138.965.084.125</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Jangka Panjang  
Rp 0*

**C.3. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  
Rp 0*

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 30 september 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR  
Triwulan III TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tagihan Penjualan Angsuran  
Rp 0*

**C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA  
Triwulan III TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp 0

### C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.  
Panjang  
Triwulan III TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tagihan TPA</b>			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aset Lainnya  
Rp .1.992.799.680

### C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.992.799.680 dan Rp 36.997.000

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi kanwil Maluku terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud  
Rp 0

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud  
(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	-
<b>Pembelian</b>	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>	-
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2022</b>	-
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Lain-Lain  
Rp 1.524.593.650

**C.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 1.524.593.650 dan Rp 2.557.709.450.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain  
(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 desember 2022</b>	<b>2.557.709.450</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Reklasifikasi dari Aset Tetap</b>	145.407.456
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Penggunaan kembali BMN yang dihentikan</b>	
<b>Penghapusan BMN</b>	1.178.523.256
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>1.524.593.650</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	(1.491.849.650)
<b>Nilai Buku Per 30 september 2023</b>	<b>1.524.593.650</b>

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp 1.493.124.650

**C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 september 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.493.124.650 dan Rp 2.520.712.450. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset  
Lainnya Semester II TA 2023  
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	<b>Aset Tak Berwujud</b>	0	0	0
1.				
	<b>Jumlah</b>			
B.	<b>Aset Lain-lain</b>	1.524.593.650	(1.493.124.650)	32.744.000
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Total</b>	<b>1.524.593.650</b>	<b>(1.491.849.650)</b>	<b>32.744.000</b>

Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp 1.643.413.461

**C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.643.413.461 dan Rp 113.292.179.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp 0*

**C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp 1.643.413.461*

**C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.643.413.461 dan Rp 113.292.179. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	6.142.000
2.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	93.420.594
3.	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0
4.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.812.527.826
<b>Total</b>		<b>1.643.413.461</b>

*Pendapatan Diterima di Muka  
Rp 0*

**C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka  
Triwulan III TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
<b>Pendapatan diterima dimuka</b>	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar  
Rp 0*

**C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
<b>Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar</b>		
<b>Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar</b>		
<b>Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar</b>		
<b>Jumlah</b>		

*Utang Yang Belum  
Ditagihkan  
Rp 0*

**C.5.5. Utang Yang Belum Ditagihkan**

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bapas Ambon	(9.599.4250)
2.	LPKA Ambon	(18.595.138)
3.	Lapas Ambon	(268.602.170)
4.	Lapas Piru	(49.800.000)
5.	Lapas Saparua	(67.425.587)
6.	Rutan Masohi	(33.000.000)
7.	Lapas Namlea	(119.784.210)
8.	Lapas Bandanaira	(3.840.000)
9.	Lapas Wahai	(20.000.000)
10.	Lapas Wonreli	(65.200.000)
11.	Lapas Tual	(86.670.954)
12.	Lapas Saumlaki	(1.825.000)
13.	Lapas Ambon	(65.926.554)
	<b>Total</b>	<b>(860.518.238)</b>

*Ekuitas*  
*Rp*  
*252.353.344.607*

**C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 252.353.344.607 dan Rp 268.603.423.683. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan PNPB*  
*Rp 125.621.024*

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 125.621.024 dan Rp 164.166.366. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
 Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan	90,352,590	76.089.683	(4,83)
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	17.471.434	31.586.240	(44,69)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	200.000	(100)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	19.817.431	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>89.886.970</b>	<b>127.693.354</b>	<b>29,61</b>

*Beban Pegawai*  
*Rp 46.282.935.138*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 46.282.935.138 dan Rp 44.655.955.571. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
 Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	SM II TA 2023	SM II TA 2022	%
Beban Gaji pokok PNS	30.946.854.230	25.184.841.120	4,51
Beban pembulatan gaji PNS	659.745	545.564	2,69
Beban Tunj- suami istri PNS	1.641.075.821	1.347.705.356	3,68
Beban Tunj- anak PNS	480.629.479	387.674.974	5,22
Beban tunj struktural PNS	617.540.000	527.370.000	(0,91)

Beban tunj fungsional PNS	2.677.455.000	2.189.640.000	4,26
Beban tunj pph PNS	11.102.073	8.863.856	(17,62)
Beban tunj beras PNS	1.825.673.640	1.496.371.920	3,81
Beban uang makan PNS	7.783.316.150	5.233.751.000	0,01
Beban tunj umum PNS	8.070.000	180.000	3,977,78
Beban uang lembur PNS	290.559.000	114.777.000	0,56
<b>Jumlah Beban</b>	<b>46.282.935.138</b>	<b>36.491.720.790</b>	<b>3,72</b>

*Beban Persediaan*  
Rp 4.358.755.346

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.358.755.346 dan Rp 4.008,870,458. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>SM II 2023</b>	<b>SM II 2022</b>	<b>%</b>
Barang persediaan Konsumsi	6.678.075.529	2.434.731.965	3,03
Amunisi	911.892.988	12.474	336733,67
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		35.965.500	(100)
Beban Persediaan Bahan Baku		19.447.000	(100)
Beban Persediaan Lainnya		20.137.000	(100)
Bahan Untuk Pemeliharaan	419.721.505		
<b>Jumlah</b>	<b>4.358.755.346</b>	<b>2.474.328.439</b>	<b>3,08</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp 25.622.424.213

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 25.622.424.213 dan Rp 26.332.536.838. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian jenis beban	TA 2023	2022	Naik/Turun
Beban Keperluan Perkantoraan	1.747.215.932	2.254.846.485	(40,67)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	15.349.042.438	10.318.250.316	2,26
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	785.056.700	561.287.000	4,32
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.577.500	9.504.000	9,01
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.020.880.000	626.870.000	5,51
Beban Barang Operasional Lainnya	3.500.000	181.452.000	(98,07)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	750.000	24.241.000	(96,91)
Beban Bahan	2.903.541.042	1.669.239.302	32,95
Beban Honor Output Kegiatan	53.550.000	30.910.000	3,36
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.763.468.097	1.284.287.300	10,64
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	24.560.658	41.886.000	(41,36)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	400.000	46.000.000	(100)
Beban Langganan Listrik	1.140.668.000	684.171.347	20,78
Beban Langganan Telepon	39.656.831	27.120.334	13,00
Beban Langganan Air	157.326.515	148.814.200	41,77
Beban Sewa	229.500.000	136.000.000	48,66
Beban Jasa Profesi	355.570.000	229.482.500	12,82
Beban Jasa Lainnya	25.192.500	625.000	1.534,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	9.436.000	(100)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	24.220.000	(100)
<b>JUMLAH</b>	<b>25.622.424.213</b>	<b>26.332.068.838</b>	<b>(709)</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp 5.687.657.721

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.687.657.721 dan Rp 5.336.309.729. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	SM II 2023	SM II 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.712.301.003	3.316.921.137	(0,44)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.074.001.214	736.113.047	12,27
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	126.151.000	325.855.500	107,81
<b>Jumlah Beban</b>	<b>5.687.657.721</b>	<b>4.378.889.684</b>	<b>9,75</b>

*Beban Perjalanan Dinas*  
Rp 4.145.246.563

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.145.246.563 dan Rp 4.824.877.508. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	SM II 2023	SM II 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	3.435.111.911	2.060.261.069	29,23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	710.134.652	429.775.597	2,52
<b>Jumlah</b>	<b>4.145.246.563</b>	<b>2.490.036.666</b>	<b>22,15</b>

*Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat*  
Rp 0

**D.7 Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	TW III 2023	TW III 2022	%
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-
<b>Jumlah Beban</b>	-	-	-

Beban Sosial Rp0

Bantuan **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	SM II 2023	SM II 2022	%
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah Beban</b>	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 9.292.940.828

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 9.292.940.828 dan Rp 8.821.264.341. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	SM II 2023	SM II 2022	%
Beban penyusutan peralatan dan Mesin	4.667.938.386	2.017.926.331	8,11
Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	4.622.452.442	2.310.150.023	0,03
Beban Penyusutan aset tetap lainnya	2.550.000	1.275.000	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>9.292.940.828</b>	<b>4.329.351.354</b>	<b>3,80</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih  
Rp 0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 77.461 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Semester TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	0	77.461	200
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>77.461</b>	<b>200</b>

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp 0

#### D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	SM II 2023	SM II 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	35.199.009	79,09
Beban Pelepasan Aset	0	-	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.537.028	318,89
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	22.490.000	(100)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>61.226.037</b>	<b>(68,64)</b>

Pos Luar Biasa Nihil

#### D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp 268.603.423.683*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 268.603.423.683 dan Rp 267.444.126.448.

*Defisit LO*  
*Rp (95.341.967.873)*

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp (95.341.967.873) dan Rp. (93.843.332.103) Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi*  
*Rp 0*

### **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0.

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp 0*

### **E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
*Rp0*

### **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Koreksi Nilai Persediaan Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

*Selisih Revaluasi Aset*  
*Rp 0*

### **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi Nilai Aset  
Non Revaluasi  
Rp 21.840.783.840

**E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 21.840.783.840 dan Rp 394.512.320.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	21.840.783.840
<b>Jumlah</b>	<b>21.840.783.840</b>

Koreksi Lain-lain  
Rp 0

**E.4.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
<b>Jumlah</b>	

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp 100.932.595.176

**E.5. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 100.932.595.176 dan Rp 94.607.649.018.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(163.289.216)
Ditagihkan ke Entitas Lain	88.123.599.681
Transfer Masuk	17.580.264.361
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>100.932.595.176</b>

**E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 163.289.216 sedangkan DKEL sebesar Rp 88.123.599.681.

**E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 17.580.264.361 dan transfer keluar sebesar Rp 4.623.979.650.

Transfer Masuk  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Transfer Masuk	Ditjen Pemasarakatan	0
2.	Tranfer Keluar		0
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

**E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung  
Semester II TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			
2.			
<b>Jumlah</b>			

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp 252.353.344.607*

#### **E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 252.353.344.607 dan Rp 268.602.955.683.

### **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

#### **F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

1. Nilai tanah berkurang sebesar Rp. 21.828.750.000 (Dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Lapas Kelas IIB Piru dikarenakan terdapat temuan APIP Pada Lapas Kelas IIB Piru Berupa Double Catat pada BMN Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan Luasan 40.000 m<sup>2</sup> dengan Nilai Tanah Rp 21.828.750.000 dan sudah di tindak lanjuti sesuai Rekomendasi Surat Inspektorat Jenderal Nomor : ITJ-PW.03.01-128 tanggal 15 Mei 2023 dengan cara melakukan Koreksi Pencatatan Pada Aplikasi Sakti.

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU**

Tgl Data : 15/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:12 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	125,621,024	164,166,366	(38,545,342)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	125,621,024	164,166,366	(38,545,342)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	125,621,024	164,166,366	(38,545,342)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	46,379,762,138	44,655,955,571	1,723,806,567	-
Beban Persediaan	4,358,755,346	4,008,870,458	349,884,888	-
Beban Barang dan Jasa	25,622,424,213	26,332,068,838	(709,644,625)	-
Beban Pemeliharaan	5,687,657,721	5,336,309,729	351,347,992	-
Beban Perjalanan Dinas	4,145,246,563	4,824,877,508	(679,630,945)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU**

Tgl Data : 15/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:12 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,292,940,828	8,821,264,341	471,676,487	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	77,461	(77,461)	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>95,486,786,809</b>	<b>93,979,423,906</b>	<b>1,507,362,903</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(95,361,165,785)</b>	<b>(93,815,257,540)</b>	<b>(1,545,908,245)</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4,381,701	35,199,009	(30,817,308)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7,359,701	35,199,009	(27,839,308)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,978,000	0	2,978,000	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,816,211	(62,805,572)	77,621,783	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,816,211	26,027,028	(11,210,817)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	88,832,600	(88,832,600)	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>19,197,912</b>	<b>(27,606,563)</b>	<b>46,804,475</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(95,341,967,873)</b>	<b>(93,842,864,103)</b>	<b>(1,499,103,770)</b>	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(95,341,967,873)</b>	<b>(93,842,864,103)</b>	<b>(1,499,103,770)</b>	-

Keterangan :

BELUM FINAL



# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU

Tgl Data : 15/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:12 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	268,603,423,683	267,444,126,448	1,159,297,235	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,341,967,873)	(93,842,864,103)	(1,499,103,770)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(21,840,706,379)	394,512,320	(22,235,218,699)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(21,840,783,840)	394,512,320	(22,235,296,160)	-
LAIN-LAIN	77,461	0	77,461	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	100,932,595,176	94,607,649,018	6,324,946,158	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(16,250,079,076)	1,159,297,235	(17,409,376,311)	-
EKUITAS AKHIR	252,353,344,607	268,603,423,683	(16,250,079,076)	-

Keterangan :

BELUM FINAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013**  
**UAPPAW : BA(013) ES1(05) MALUKU 013052100KD**

Tgl Data : 15/03/24 12:28 AM  
Tgl Cetak : 15/03/24 7:13 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_uappaw\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>90,292,475,000</b>	<b>88,139,599,681</b>	<b>(2,152,875,319)</b>	<b>98</b>	<b>88,034,917,000</b>	<b>86,038,589,260</b>	<b>(1,996,327,740)</b>	<b>98</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

**NERACA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN**  
**UAPPAW : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU**

Tgl Data : 15/03/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:14 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_uappaw\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	0	15,492,280	(15,492,280)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(77,461)	77,461	(100.00)
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>0</b>	<b>15,414,819</b>	<b>(15,414,819)</b>	<b>(100.00)</b>
Persediaan	8,009,690,022	5,177,070,910	2,832,619,112	54.71
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>8,009,690,022</b>	<b>5,192,485,729</b>	<b>2,817,204,293</b>	<b>54.26</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	102,041,077,000	123,869,827,000	(21,828,750,000)	(17.62)
Peralatan dan Mesin	56,115,708,005	47,459,305,041	8,656,402,964	18.24
Gedung dan Bangunan	152,343,386,499	152,261,846,499	81,540,000	0.05
Aset Tetap Lainnya	176,735,352	176,735,352	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,991,381,641	0	2,991,381,641	0.00
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(69,674,020,131)</b>	<b>(60,280,480,759)</b>	<b>(9,393,539,372)</b>	<b>15.58</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>243,994,268,366</b>	<b>263,487,233,133</b>	<b>(19,492,964,767)</b>	<b>(7.40)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,961,330,680	0	1,961,330,680	0.00
Aset Lain-lain	1,524,593,650	2,557,709,450	(1,033,115,800)	(40.39)
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(1,493,124,650)</b>	<b>(2,520,712,450)</b>	<b>1,027,587,800</b>	<b>(40.77)</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1,992,799,680</b>	<b>36,997,000</b>	<b>1,955,802,680</b>	<b>5,286.38</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>253,996,758,068</b>	<b>268,716,715,862</b>	<b>(14,719,957,794)</b>	<b>(5.48)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,643,413,461	113,292,179	1,530,121,282	1,350.60
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,643,413,461</b>	<b>113,292,179</b>	<b>1,530,121,282</b>	<b>1,350.60</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1,643,413,461</b>	<b>113,292,179</b>	<b>1,530,121,282</b>	<b>1,350.60</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	252,353,344,607	268,603,423,683	(16,250,079,076)	(6.05)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>252,353,344,607</b>	<b>268,603,423,683</b>	<b>(16,250,079,076)</b>	<b>(6.05)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>252,353,344,607</b>	<b>268,603,423,683</b>	<b>(16,250,079,076)</b>	<b>(6.05)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>253,996,758,068</b>	<b>268,716,715,862</b>	<b>(14,719,957,794)</b>	<b>(5.48)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN**  
**UAPPAW : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU**

Tgl Data : 15/03/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:14 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_uappaw\_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU

Tgl Data : 15/03/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:14 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,678,075,529	0
0.0	117112	Amunisi	911,892,988	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	419,721,505	0
0.0	131111	Tanah	102,041,077,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	56,115,708,005	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	152,343,386,499	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	176,735,352	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,991,381,641	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	39,557,346,244
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	30,105,773,887
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	10,900,000
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,961,330,680	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1,524,593,650	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	1,493,124,650
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	102,969,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	82,388,594
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,458,055,867
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,139,599,681
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	163,289,216	0
0.0	313211	Transfer Keluar	4,623,979,650	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,580,264,361
0.0	391111	Ekuitas	0	268,603,423,683
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	21,840,783,840	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	77,461
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,359,701
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	90,352,590
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	35,004,434
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	14,816,211
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	264,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	30,946,854,230	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	659,745	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,641,075,821	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	480,629,479	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	617,540,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,677,455,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,102,073	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,825,673,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	7,880,143,150	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU

Tgl Data : 15/03/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:14 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,070,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	290,559,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,747,215,932	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	15,349,042,438	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	785,056,700	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,577,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,020,880,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,500,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	750,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,903,541,042	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	53,550,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,763,468,097	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	24,560,658	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	400,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,140,668,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	39,656,831	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	162,294,515	0
3.0	522141	Beban Sewa	229,500,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	355,570,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	25,192,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,654,721,003	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,074,001,214	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,435,111,911	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	710,134,652	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,667,938,386	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,622,452,442	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	2,550,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,316,239,754	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	42,515,592	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	958,935,504	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	2,978,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>447,281,720,364</b>	<b>447,281,720,364</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU

Tgl Data : 15/03/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:15 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	88,139,599,681
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	163,289,216	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,359,701
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	90,352,590
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	35,004,434
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	14,816,211
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	15,492,280
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	264,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30,946,854,230	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	670,564	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,641,075,821	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	480,629,479	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	617,540,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,677,455,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,102,073	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,825,673,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	7,783,624,150	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,070,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	290,559,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,749,196,932	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	15,495,642,763	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	785,056,700	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,577,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,020,880,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,500,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	750,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,903,541,042	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53,550,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,763,468,097	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	24,560,658	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	400,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,947,809,899	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	317,983,362	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,131,392,409	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	39,795,831	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	161,721,515	0
3.0	522141	Belanja Sewa	229,500,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	355,570,000	0



## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 013052100KD ) BA(013) ES1(05) MALUKU

Tgl Data : 15/03/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/03/24 7:15 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	25,192,500	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,712,301,003	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	126,151,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,074,001,214	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	67,190,950	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,435,151,911	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	710,134,652	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262,278,300	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,380,238,305	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	61,860,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	10,819
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	40,000
JUMLAH			<b>88,302,939,716</b>	<b>88,302,939,716</b>

Keterangan :

BELUM FINAL